

Transformasi Sistem Ekonomi Terpusat di Vietnam: Pelajaran bagi Reformasi Ekonomi Indonesia

Falih Restu Heramukti¹, Esa Prasetyo Ardianto², Zaidan Wahyu Hidayat³, Muhammad Adi Nugroho⁴, Cut Misni Mulaswi⁵

Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

* Corresponding Author. Email: falih.heramukti@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak: Transformasi sistem ekonomi Vietnam sejak penerapan kebijakan *Đổi Mới* tahun 1986 menjadi rujukan penting bagi negara-negara berkembang dalam membangun perekonomian yang tangguh dan adaptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keberhasilan strategi reformasi ekonomi Vietnam dan mengevaluasi relevansinya terhadap upaya reformasi ekonomi Indonesia pascakrisis 1998. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan melalui metode studi kasus komparatif, dengan dukungan analisis kebijakan publik dan kerangka reformasi struktural dari OECD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Vietnam tidak hanya disebabkan oleh liberalisasi sektor ekonomi, tetapi juga oleh konsistensi arah kebijakan, penguatan institusi publik, serta pengelolaan makroekonomi yang stabil. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi hambatan struktural akibat reformasi yang kurang terkoordinasi dan lemahnya kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, pengalaman Vietnam memberikan pelajaran penting bahwa reformasi ekonomi yang efektif membutuhkan visi jangka panjang, sinergi antarsektor, dan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan resilien.

Kata Kunci: Ekonomi pasar, Investasi asing, Kelembagaan, Reformasi struktural, Vietnam

The Transformation of Vietnam's Centralized Economic System: Lessons for Indonesia's Economic Reform

Abstract: Vietnam's economic transformation since the implementation of the *Đổi Mới* policy in 1986 has become a key reference for developing countries in building a resilient and adaptive economy. This study aims to explore Vietnam's successful economic reform strategies and evaluate their relevance to Indonesia's post-1998 reform agenda. A qualitative descriptive approach was employed using a comparative case study method, supported by public policy analysis and OECD's structural reform framework. The findings indicate that Vietnam's success stemmed not only from sectoral liberalization, but also from policy consistency, strong public institutions, and stable macroeconomic management. In contrast, Indonesia continues to face structural constraints due to fragmented reforms and weak institutional capacity. Therefore, Vietnam's experience offers essential lessons, suggesting that effective economic reform requires long-term policy direction, cross-sectoral coordination, and continuous improvement in governance to achieve inclusive and resilient growth.

Keywords: Foreign investment, Institutional reform, Market economy, Structural reform, Vietnam.

How to Cite: Heramukti, F.R., Ardianto, E.P., Hidayat, Z.W., Nugroho, M.A., Mulaswi, C.M., (2025). Transformasi Sistem Ekonomi Terpusat di Vietnam: Pelajaran bagi Reformasi Ekonomi Indonesia. *Jurnal JEBA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 27(3), 24-29. Doi:<http://dx.doi.org/10.30870/unik.v6i2.13927>

PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi yang dialami Vietnam merupakan salah satu contoh penting dalam sejarah pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang. Sebelumnya, Vietnam mengikuti sistem ekonomi terpusat dengan pengawasan penuh dari pemerintah terhadap seluruh proses ekonomi, tetapi mengalami sejumlah perubahan signifikan setelah penerapan kebijakan Renovasi pada tahun 1986. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi kondisi stagnasi ekonomi yang berkepanjangan disebabkan oleh sistem pusat yang tidak efisien, inflasi tinggi, kekurangan barang, serta rendahnya produktivitas di sektor pertanian dan industri. Menandai perubahan Vietnam dari ekonominya yang komando ke ekonomi pasar sosialis, yang menggabungkan mekanisme pasar dengan pengendalian negara pada aspek-aspek strategis (Nguyen dan Tran, 2021).

Reformasi ini dilakukan secara bertahap dan menyeluruh, meliputi pembebasan sektor pertanian dengan memberikan hak milik lahan terbatas kepada para petani, pembongkaran regulasi industri yang memungkinkan inisiatif dari sektor swasta dan koperasi, serta pelonggaran ketentuan untuk investasi asing langsung (FDI). Di samping itu, pemerintah Vietnam juga memperkuat institusi ekonomi makro melalui reformasi fiskal dan moneter yang lebih terbuka, mencakup pengendalian inflasi dan pengelolaan utang negara. Efek dari kebijakan tersebut sangat signifikan. Dalam tiga dekade, Vietnam berhasil mengurangi angka kemiskinan ekstrem dari lebih dari 70% pada tahun 1990 menjadi di bawah 3% pada tahun 2020, serta mencatatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6% setiap tahun (World Bank, 2020). Peningkatan juga terjadi pada ekspor manufaktur, pergeseran struktur ekonomi dari pertanian ke industri, dan integrasi yang kuat dalam jaringan pasokan global (IMF, 2022).

Keberhasilan Vietnam dalam melaksanakan reformasi ekonomi membuka peluang refleksi bagi Indonesia, yang juga memiliki sejarah panjang dalam mengelola sistem ekonomi yang didominasi oleh peran negara, terutama di era Orde Baru (1966–1998). Indonesia telah melaksanakan reformasi ekonomi setelah krisis moneter 1998 dengan berbagai kebijakan liberalisasi dan deregulasi. Namun, reformasi tersebut belum sepenuhnya berhasil menyelesaikan masalah struktural yang mendalam, seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, birokrasi yang belum efisien, ketergantungan pada sektor ekstraktif seperti batu bara dan kelapa sawit, serta rendahnya nilai tambah dari sektor manufaktur (OECD, 2022; Basri, 2023).

Dalam konteks ini, penting bagi Indonesia untuk belajar dari pengalaman negara lain seperti Vietnam, bukan untuk meniru secara langsung, tetapi untuk mengadopsi prinsip-prinsip kebijakan yang terbukti efektif dan sesuai dengan struktur sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Contohnya adalah bagaimana Vietnam berhasil menjaga stabilitas makroekonomi di tengah liberalisasi, membangun kepercayaan investor tanpa kehilangan kontrol strategis oleh negara, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan. Pengalaman Vietnam juga menunjukkan bahwa reformasi tidak harus dilakukan secara drastis, tetapi bisa dilakukan dengan cara yang bertahap dan konsisten sesuai dengan arah kebijakan jangka panjang yang jelas (Nguyen, 2021; Vo, 2023).

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana Vietnam mengelola transformasi ekonominya dari sistem terpusat ke pasar sosialis, dan bagaimana prinsip-prinsip utama dari proses tersebut dapat diterapkan dalam reformasi ekonomi Indonesia. Dengan pendekatan komparatif dan analisis kebijakan publik, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara konseptual maupun praktis dalam memperkuat strategi reformasi ekonomi nasional yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di tengah tantangan global saat ini, seperti krisis iklim, ketidakpastian geopolitik, serta gangguan digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus komparatif, yang difokuskan pada analisis mendalam terhadap proses transformasi sistem ekonomi di Vietnam dan keterkaitannya dengan agenda reformasi ekonomi di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali dinamika kebijakan ekonomi, konteks historis, serta perubahan struktural yang tidak dapat direduksi ke dalam angka-angka kuantitatif (Creswell & Poth, 2018). Penelitian ini bersifat eksploratif dan interpretatif, dengan tujuan mengungkap pola, strategi, serta faktor-faktor keberhasilan reformasi yang dilakukan oleh Vietnam, lalu mencocokkannya secara kritis dengan konteks ekonomi-politik di Indonesia.

Metode studi kasus digunakan karena kasus reformasi ekonomi Vietnam memberikan konteks konkret yang dapat dianalisis secara menyeluruh dari berbagai dimensi: politik, institusional, ekonomi makro, serta pembangunan sosial. Sementara itu, aspek komparatif difokuskan pada pembandingan aspek-aspek kunci seperti: peran negara dalam perekonomian, liberalisasi sektor industri dan pertanian, reformasi fiskal-moneter, dan strategi menarik investasi asing langsung (FDI).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis kebijakan publik sebagai instrumen konseptual, yang membantu peneliti memahami bagaimana kebijakan ekonomi dirancang, diimplementasikan, dan memberikan dampak pada struktur ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan ini melibatkan evaluasi terhadap aktor kebijakan, instrumen regulasi, serta pengaruh institusi dalam proses reformasi (Dunn, 2017; Howlett & Ramesh, 2020).

Secara keseluruhan, metode ini bertujuan untuk tidak hanya menggambarkan proses transformasi ekonomi Vietnam, tetapi juga untuk menghasilkan refleksi strategis dan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan konteks pembangunan ekonomi Indonesia.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan dua kerangka konseptual. Pertama, kerangka siklus kebijakan (policy cycle) dari Howlett dan Ramesh (2020), yang memetakan proses kebijakan mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi dan revisi. Kerangka ini digunakan untuk menelaah bagaimana Vietnam mendesain dan menyesuaikan kebijakan ekonominya secara bertahap sejak masa Renovasi, serta bagaimana Indonesia menjalankan reformasinya pasca-krisis 1998.

Kedua, digunakan pula kerangka dimensi reformasi struktural sebagaimana dikembangkan oleh OECD (2019), yang meliputi aspek peran negara dalam perekonomian, liberalisasi sektor, reformasi fiskal dan moneter, investasi, serta pembangunan institusi. Kerangka ini dimanfaatkan untuk melakukan analisis perbandingan secara sistematis antara Vietnam dan Indonesia, guna mengidentifikasi prinsip-prinsip kebijakan yang dapat direplikasi atau disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Penggunaan kedua kerangka tersebut membantu menjaga objektivitas analisis, memperkuat struktur interpretasi, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan secara empiris dan teoritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini mengungkap bahwa reformasi ekonomi Vietnam, yang dimulai sejak diterapkannya kebijakan Đổi Mới pada tahun 1986, merupakan contoh nyata perubahan struktural yang berlangsung secara bertahap dan konsisten. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi dokumen dan kajian literatur, diperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana Vietnam mengubah sistem ekonomi terpusat menjadi model pasar sosialis yang lebih terbuka, namun tetap mempertahankan kontrol negara dalam sektor-sektor strategis.

Salah satu kebijakan penting yang mendorong transformasi ini adalah pembagian hak kelola lahan kepada petani, deregulasi sektor industri untuk mendorong partisipasi swasta, penguatan kerangka fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas makro, dan pengembangan zona industri untuk memudahkan investasi asing. Proses ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa Vietnam secara teratur membangun dasar reformasi dengan memperhatikan kesinambungan kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan.(Nguyen & Tran, 2021; IMF, 2022; World Bank, 2020).

Sebagai perbandingan, Indonesia yang mulai reformasi ekonomi setelah krisis 1998, meskipun menunjukkan kemajuan di beberapa sektor, belum sepenuhnya berhasil mengatasi permasalahan struktural yang mendalam. Ketergantungan terhadap sektor-sektor berbasis komoditas mentah, lemahnya kinerja sektor manufaktur, serta keterbatasan dalam penguatan kelembagaan menjadi hambatan utama yang membedakan hasil reformasi Indonesia dengan Vietnam (Basri, 2023; OECD, 2022).

Tabel 1. Dimensi Reformasi Ekonomi: Vietnam vs Indonesia

Dimensi Reformasi	Vietnam	Indonesia
Pertanian	Akses lahan diperluas, hasil panen meningkat	Subsidi terbatas, distribusi tidak merata
Industri	Dorongan ekspor manufaktur, keterhubungan global	Dominasi bahan mentah, nilai tambah masih rendah
Kebijakan Fiskal/Moneter	Stabilitas terjaga, inflasi terkendali	Defisit anggaran rutin, ketergantungan pada ekspor komoditas



Ivestasi Asing	Iklim investasi kompetitif, zona industri strategis	Iklim investasi kurang konsisten, regulasi tumpang tindih
Institusi dan Tata Kelola	Koordinasi antarlembaga baik, reformasi berkelanjutan	Reformasi terhambat birokrasi dan kepentingan sektoral

Dari temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Vietnam terletak pada keberlanjutan strategi dan komitmen politik dalam pelaksanaan reformasi. Pendekatan bertahap namun terstruktur terbukti mampu memperkuat kepercayaan investor, memperluas ekspor, serta menurunkan kemiskinan secara signifikan. Sebaliknya, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa reformasi ekonomi yang tidak ditopang oleh stabilitas kebijakan dan koordinasi kelembagaan yang kuat berisiko menghasilkan perubahan yang tidak merata dan mudah terdistorsi oleh dinamika politik jangka pendek.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan bahwa kita dapat belajar banyak dari pengalaman Vietnam saat membuat strategi reformasi ekonomi Indonesia yang akan datang, terutama dengan memperhatikan keselarasan antar sektor, penguatan institusi publik, dan arah kebijakan lintas pemerintahan yang jelas.

Pembahasan

Transformasi ekonomi yang dialami Vietnam sejak diberlakukannya kebijakan Đổi Mới pada 1986 menunjukkan pentingnya reformasi bertahap yang dikawal oleh arah kebijakan yang konsisten. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan meninjau literatur dan dokumentasi. Ini memungkinkan analisis mendalam dinamika transformasi yang terjadi dalam struktur ekonomi Vietnam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi pasar bukanlah satu-satunya faktor yang membuat Vietnam sukses; lebih dari itu, kombinasi dari keterbukaan ekonomi dan peningkatan fungsi pemerintah di bidang-bidang penting adalah kunci keberhasilan Vietnam. Reformasi di sektor agraria melalui pemberian hak kelola tanah kepada petani, serta pembentukan zona-zona ekonomi khusus untuk menarik investasi asing, merupakan bukti konkret bagaimana Vietnam menggabungkan peran pasar dan negara secara seimbang (Nguyen & Tran, 2021; World Bank, 2020).

Secara teoritis, pendekatan pembangunan Vietnam mencerminkan konsep "pertumbuhan yang terkendali" sebagaimana diteorikan oleh Rodrik (2007), yang menekankan perlunya adaptasi kebijakan pembangunan terhadap konteks kelembagaan masing-masing negara. Dalam hal ini, Vietnam menunjukkan kapasitas institusional yang cukup kuat untuk melanjutkan reformasi di tengah perubahan ekonomi global. IMF (2022) mencatat bahwa Vietnam berhasil menjaga stabilitas makro dengan tetap mendorong ekspor berbasis industri berteknologi menengah dan padat karya. Keberhasilan ini sejalan dengan keyakinan North (1990), yang menyatakan bahwa institusi yang kuat dan konsisten adalah pilar utama transisi ekonomi jangka panjang.

Berbeda dengan Vietnam, Indonesia menunjukkan kecenderungan reformasi yang tidak merata dan sering kali terfragmentasi. Meskipun reformasi ekonomi mulai dijalankan setelah krisis moneter 1998, implementasinya tidak sepenuhnya didukung oleh kesinambungan kebijakan antarperiode pemerintahan. Ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah, lemahnya basis industri manufaktur, serta belum optimalnya reformasi kelembagaan menjadi penghambat utama transformasi struktural di Indonesia (Basri, 2023; OECD, 2022). Dari perspektif kelembagaan, keadaan Indonesia digambarkan sebagai "governance fragmented", dengan koordinasi antar institusi yang lemah dan reformasi yang lebih sering reaktif terhadap krisis daripada direncanakan untuk masa depan.

Oleh karena itu, pembelajaran dari pengalaman Vietnam menjadi sangat relevan. Reformasi yang berhasil tidak hanya bergantung pada kebijakan ekonomi yang dirancang dengan baik, tetapi juga pada keberadaan struktur kelembagaan yang mampu menjaga arah dan kesinambungan kebijakan. Untuk menciptakan stabilitas jangka panjang dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia harus menerapkan metode reformasi yang tidak hanya teknokratis tetapi juga mempertimbangkan elemen kelembagaan dan politik.

SIMPULAN

Studi ini menyelidiki pergeseran ekonomi Vietnam dari model sentralistik ke pasar sosialis terbuka dan bagaimana perubahan ini berdampak pada rencana reformasi ekonomi Indonesia. Berdasarkan pendekatan studi kasus komparatif dan kerangka analisis kebijakan publik, ditemukan bahwa keberhasilan reformasi ekonomi Vietnam tidak hanya didorong oleh liberalisasi sektor-sektor utama, tetapi juga oleh kesinambungan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan negara dalam mengarahkan pembangunan jangka panjang secara bertahap dan konsisten.

Transformasi yang dilakukan Vietnam—melalui deregulasi sektor industri, redistribusi hak kelola lahan, stabilisasi makroekonomi, serta kemudahan bagi investasi asing—telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, penurunan tingkat kemiskinan ekstrem secara signifikan, dan peningkatan daya saing industri manufakturnya di kancah global. Sebaliknya, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa reformasi yang bersifat sporadis, kurang terkoordinasi, dan tidak disertai dengan penguatan institusi justru menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti ketergantungan pada komoditas mentah, stagnasi sektor manufaktur, serta lemahnya efektivitas tata kelola.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar dari keberhasilan reformasi Vietnam dapat menjadi referensi penting bagi perumusan ulang strategi pembangunan ekonomi di Indonesia. Agar mampu menghadapi tantangan global, reformasi yang berhasil membutuhkan kebijakan jangka panjang yang terencana dengan baik, kerja sama yang solid antar lembaga, serta dukungan kelembagaan yang kuat guna mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan..

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, M. C. (2023). Indonesia's economic reform after the Asian financial crisis: What went right and what went wrong. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), 1–22. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2176543>
- Basri, M. C. (2023). Reformasi ekonomi Indonesia: Tantangan dan prospek. Jakarta: LP3ES.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2017). Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.). Routledge.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2020). Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems (4th ed.). Oxford University Press.
- IMF. (2020). Vietnam: 2020 Article IV Consultation—Press Release; Staff Report. International Monetary Fund. <https://www.imf.org>
- IMF. (2022). Vietnam: 2022 Article IV Consultation—Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/07/15/Vietnam-2022-Article-IV-Consultation-520744>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). RPJMN 2020–2024: Reformasi struktural dan transformasi ekonomi. Jakarta: Bappenas.
- Komite Ekonomi dan Industri Nasional. (2022). Rekomendasi kebijakan reformasi ekonomi Indonesia. Jakarta: KEIN.
- Krippendorff, K. (2019). Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.). SAGE Publications.
- Nguyen, T. H., & Tran, M. T. (2021). Economic transformation in Vietnam: Lessons from three decades of



Falih Restu Heramukti, Esa Prasetyo Ardianto, Zaidan Wahyu Hidayat, Muhammad Adi Nugroho, Cut Misni Mulaswi reform. Asian Economic Policy Review, 16(2), 230–248. <https://doi.org/10.1111/aepr.12301>

Nguyen, T. V., & Tran, Q. H. (2021). Vietnam's economic reform: From centrally planned to socialist-oriented market economy. Asian Economic Policy Review, 16(1), 45–64.

OECD. (2019). Going for growth 2019: Structural reform priorities. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/bc74d3d7-en>

OECD. (2022). OECD Economic Surveys: Indonesia 2022. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/economy/indonesia-economic-snapshot/>

OECD. (2022). Structural reform priorities for Indonesia: Lessons from Southeast Asia. OECD Publishing. <https://www.oecd.org>

UNDP. (2020). Human Development Report – Vietnam 2020. United Nations Development Programme. <https://www.vn.undp.org>

Vo, D. H. (2023). Managing economic transition in Vietnam: Institutional reform and state capacity. Vietnam Economic Journal, 5(1), 15–34.

World Bank. (2020). Vietnam: Navigating the path to recovery. World Bank Group. <https://www.worldbank.org>

World Bank. (2021). Vietnam's economic transformation report. The World Bank Group. <https://www.worldbank.org>